

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anderson, B. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. (London: Verso Books, 2006).
- Babbie, Earl. *The Basics of Social Research*, 4th ed. (USA: Thomson Wadsworth, 2008).
- Braithwaite, John et al. *Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. (ANU E Press, 2010).
- Butt, S., & Lindsey, T. *Indonesia Law*. (UK: Oxford University Press, 2018).
- Chauvel, R. *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. (New York: Transaction Publishers, 2005).
- Chauvel, Richard. *Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood*. (New York: Transaction Publishers, 2005).
- Creswell, J.W. and Creswell, J. D. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (Los Angeles: Sage, 2018).
- Djopari, J.R.G. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. (Jakarta: PT Grasindo, 1995).
- Dumupa, Y. F. *Berburu Keadilan di Papua*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Fortuna, Anwar Dewi. *Indonesia in ASEAN: Vision and Reality*. (Institute of Southeast Asian Studies, 2012).
- Gietzelt, D. *The Indonesianization of West Papua*. (Oceania, No. 59, 1989).
- Human Rights Watch. *Prosecuting Politics: Indonesia's Code of Criminal Procedure and the Human Rights of Defendants*. (New York: HRW, 2010).
- Hurhayati, Y. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Nusamedia, 2020).
- Jur Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Legge J.D. *Indonesia's Incorporation of West Papua: The Background and Aftermath*. (Rowman & Littlefield, 2003).
- McGibbon, R. *Placing Papua: The Continued Search for Peace in Papua*. (Washington, DC: East-West Center Washington, 2004).
- McGibbon, R. *Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?*. (East-West Center Washington, 2004).
- Nugroho, K. A. et al. *Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Kajian Politik, 2023).
- Piotr Sztompka. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Jakarta: Prenada, 2004).
- Pujirahayu, Derita, Faisal. *Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Litera, 2020).
- Ranjabar, Jacobus. *Perubahan Sosial*. (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Rodd, McGibbon. *Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict*. (East-West Center Washington, 2004).

- Romano, D. *The Kurdish Nationalist Movement*. (UK: Cambridge University Press, 2006).
- Saafoedin Bahar. *Integrasi Nasional*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).
- Safudin, E. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Malang: Setara Press, 2017).
- Saltford John. *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of a Betrayal*. (Routledge, 2003).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Suadi, H. A., & SH, M. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum (Edisi Pertama)*. (Jakarta: Prenadamedia, 2018).
- Suharyo. *Interaksi Hukum Nasional dan Internasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Separatisme di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008).
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Syamsudin, N. *Integrasi Politik di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1989).
- Talbot, I. *Pakistan A Modern History*. (London: Hurst & Company, 2009).
- Tapol. *The Dark Side of Papuan Separatism*. (Adelaide: Crawford House, 2001).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Tuhana, T.A. *Mengapa Papua Bergejolak*. (Yogyakarta: Gama Global Media, 2001).

Jurnal/Makalah:

- Afrillia, N., & Edward, F. "Organisasi Papua Merdeka sebagai Organisasi Teroris berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018," *Reformasi Hukum*
- Amnesty International. "Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Papua", Makalah, (Jakarta: Amnesty International, 2019).
- Anonim. "Perspektif HAM atas RUU Terorisme", Komnasham, 21 Maret 2018.
- Astarini, D. R., & Rofii, M. S. "Cyber Intelligence in National Security," *Journal of Strategic and Global Studies*, Vol. 4, No. 2, July 2021.
- Benjamin Miller. "The Concept of Security: Should it be Redefined?", *Journal of Strategic Studies*, Edisi No. 2 Tahun 2002.
- Cipto, B. "Gerakan Separatis dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Demokrasi," *Unisia*, No. 47, 2003.
- Effendi, T. & Panjaitan, A. C. D. "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana", *RechtIdee*, Vol. 16, No. 2, Desember 2021.

- Febrianti, S. W. et al. "Internal Conflict Resolution Between Government of Indonesia and Separatist Movement in Papua using Horse-Trading Mechanism," *Society*, Vol. 7, No. 2, December 2019.
- Hadi, Abdul. 2021. "The Dynamics of Ethnonationalism and Conflict Resolution in Papua". *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 4 (02), 267-82. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v4i02.1054>.
- Human Rights Watch. "Laporan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Makalah, (Jakarta: HRW, 2020).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- International Crisis Group, *Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya*, Asia Report No. 23 (2001).
- International Crisis Group, *Indonesia: The Deepening Impasse in Papua*, Asia Briefing No. 108 (2010).
- John Kenedi. "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal El-Afkar*, Edisi No. 1 Tahun 2014.
- Jurnal Hukum dan Kebijakan. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan UU Anti Terorisme", Edisi No. 2 Tahun 2017.
- Jurnal Keamanan Nasional. "Otoritarianisme dalam Penegakan Hukum Terhadap Terorisme," Vol. 5, No. 1, 2021.
- Jurnal Kebijakan Publik. "Kondisi Sosial dan Budaya Papua", Vol. 4, No. 2, 2016.
- Jurnal Studi Terorisme Internasional. "Media Sosial dan Rekrutmen Teroris", Vol. 5, No. 2, 2019.
- Kementerian Dalam Negeri. "Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan Keamanan di Papua", Makalah, (Jakarta: Kemendagri, 2022).
- Kementerian Dalam Negeri. *Laporan Tahunan 2019*. (Lembaran Negara Republik Indonesia).
- Kristina Murphy et al. "Nurturing Regulatory Compliance: Is Procedural Justice Effective When People Question the Legitimacy of the Law?", *Regulation & Governance*, vol. 3, no. 1, 2009.
- Kusuma, P. D., Widhiyoga, G., Murdani, A. D. (2021). "Analisis Dukungan Vanuatu Terhadap Upaya Kemerdekaan Papua", *Jurnal Pena Wimaya*, Vol. 2, No. 1 Desember 2021
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. "Hak Komunitas Adat dalam Konteks Keamanan di Papua", Makalah, (Jakarta: LSAM, 2021).

- Maura, Conway. "Terrorism and the Internet: New Media, New Threat?", Parliamentary Affairs, Edisi No. 2 Tahun 2006.
- Mukhtar, Sidratahta. "Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia", Sociae Polites, Edisi Khusus Tahun 2011.
- Newman, E. "Exploring the "Root Causes" of Terrorism," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 29, November 2006.
- Parsch C, Wagner B, Pangau-Adam M, Nitschke C, Kreft H and Schrader J (2022) Papua at the Crossroads: A Plea for Systematic Conservation Planning in One of the Largest Remaining Areas of Tropical Rainforest. *Front. For. Glob. Change* 5:763131. doi: 10.3389/ffgc.2022.763131
- Pusat Penelitian Geopolitik Indonesia. "Geopolitik dan Keamanan di Papua", Makalah, (Jakarta: PPGI, 2018).
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. "Trust Deficit: Mengapa Masyarakat Tidak Percaya pada Aparat?", Makalah, (Jakarta: PSHK Indonesia, 2019), hal. 21-25.
- Rerung, L. T. "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Tahun 2023.
- Smith, C. S. "The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies", *Asian Survey*, Vol. 38, No. 9, 1998.
- Sobandi, K. R. "Separatisme di Asia Tenggara: Antara Penguasa dan Gerakan Nasionalis Kelompok Minoritas," *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Sobandi, K. R. "Separatisme di Asia Tenggara: Antara Penguasa dan Gerakan Nasionalis Kelompok Minoritas", *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Soedarjanto, "Politik dan Keamanan: Demokrasi, Integrasi, dan Supremasi Hukum", *Polkam*, Vol. 14, No. 18, Juli 2000.
- Sudjana, S. "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *JPIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, Edisi No. 2 Tahun 2016.
- Sumartono. "Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik", *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, Edisi No. 1 Tahun 2019.
- Tinnes, J. "Risk Assessment of Terrorism," *Perspectives on Terrorism*, Vol. 18, No. 1, 2024.
- Trisakti, Vol. 5, No. 2 (2023): 330-339. doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15038>.
- United Nations Security Council, *Resolution 1373 (2001)*. Retrieved from [https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1373-\(2001\)](https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1373-(2001)).

United Nations Security Council, *Resolution 1540 (2004)*. Retrieved from [https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1540-\(2004\)](https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1540-(2004)).

United Nations, *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (1999). Retrieved from https://treaties.un.org/doc/Treaties/2000/04/20000410%2007-41%20AM/Ch_XVIII_11p.pdf.

Universitas Cendrawasih. "Dinamika Konflik Sosial di Papua", Makalah, (Jayapura: Universitas Cendrawasih, 2020).

Perundang-Undangan:

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api*.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Penanganan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Negara.

Artikel Internet:

Adi Suhendi, "Daftar 16 Aksi Kekejaman KKB Terhadap Warga Sipil di Papua Dalam Kurun Waktu 4 Bulan Terakhir," *Tribun News*, 18 April 2021.

Ahmad Sabir, "Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua," *Jurnal Hubungan Internasional*, No. 1, Juni 2018.

Amnesty International, "Papua: Increased Militarization and Risk of Human Rights Violations," 2021.

Andrean W. Finaka dan Yuli Nurhanisah, "Operasi Nemangkawi Papua Jadi Damai Cartenz", 20 September 2022.

Anonim, "15 Operasi Militer Indonesia di Papua antara 1963 – 2004," *Suara Papua*, 12 Desember 2019.

Attwell, Rob. "Massacre in Nduga: Indonesia's Papuan Insurgency", *The Diplomat*, 2018.

BBC News, "Indonesia Labels Papua Separatist Group Terrorists, Raising Concerns," 2021.

Belarminus, Robertus. "KALEIDOSKOP 2019: Kerusuhan di Papua, Buntut Kasus Sekilas Tentang Perang Terorisme Sebagai Strategi Perang Asimetrik Modern Abad 21," *TNI Angkatan Darat*, 25 Agustus 2014.

Human Rights Watch, "Indonesia: 'Terrorist' Designation Risks Papua Violence Escalation," 2021.

Issha Harruma, "Apa Itu Separatisme?" *Kompas.com*, 21 Juli 2022.

Iswara N Raditya dan Rachma Dania, "Kala Gus Dur Mengembalikan Nama Papua & Mengizinkan Bintang Kejora", 30 Desember 2020.

Melpayanty Sinaga, "Dampak Pelabelan Teroris OPM (Organisasi Papua Merdeka) terhadap Prospek Perdamaian Papua," *Imparsial*, 8 Oktober 2021.

Mochammad Fajar Nur, "Pembebasan Pilot Susi Air & Urgensi Pendekatan Humanis di Papua", *tirto.id* 24 September 2024.

Mutia, Azura. "Mari Kenali Apa Itu KKB Papua, dari Sejarah sampai Tujuannya", *inilah.com*, 2023.

Nirmala Maulana Achmad dan Dani Prabowo, Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua", *Kompas.com*, 16 April 2024.

The Jakarta Post, "Indonesia Declares Separatist Group in Papua a Terrorist Organization," 2021.

Unknown, "Operasi Nemangkawi 2022 mengedepankan pendekatan kesejahteraan", *ANTARA*, Selasa 4 Januari 2022.